

Modal Sosial Dalam Pengembangan Pondok Pesantren

Nur Latifah, M.Pd.I

nurlatifah123@gmail.com

Abstrak

Modal sosial juga dapat dipergunakan di dalam mengembangkan lembaga-lembaga sosial seperti lembaga politik, lembaga pendidikan—termasuk di dalamnya organisasi sosial pendidikan pondok pesantren. Kuatnya modal sosial yang dimiliki pondok pesantren dapat dilihat pada beberapa hal, yaitu, norma dasar yang dijadikan acuan bagi pondok pesantren, adanya hubungan dan jaringan kerjasama yang dibangun pesantren, baik secara internal sesama santri pesantren maupun secara eksternal melakukan jaringan kerjamasa dengan lembaga-lembaga lainnya, serta adanya rasa kebersamaan warga pesantren.

Kata Kunci : Modal Sosial, Pengembangan, Pondok Pesantren

Pendahuluan

Studi-studi tentang pengembangan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan organisasi keagamaan lainnya, menunjukkan bahwa pesantren secara perlahan dan pasti terus melakukan pembenahan dalam rangka pengembangan dirinya. Perkembangan pesantren dilakukan dengan berbagai macam tahapan yang tidak mudah diamati. Snouck Hurgronje sebagaimana dikutip Geertz mengungkapkan:

“organisasi keislaman tradisional di Indonesia pada umumnya, yang kelihatannya demikian statis dan demikian kuat terbelenggu oleh pikiran-pikiran “ulama” di abad pertengahan, sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan tersebut demikian bertahap-tahap, demikian rumit dan demikian dalam tersimpan. Itulah sebabnya bagi para pengamat yang tidak kenal dengan pikiran Islam, maka perubahan-perubahan tersebut tidak akan bisa terlihat, walaupun sebenarnya terjadi di depan matanya sendiri., kecuali bagi mereka yang mengamatinya secara seksama.¹

Lembaga pendidikan pesantren yang selama ini dipandang konservatif, statis dan keberadaannya sering diremehkan dalam kehidupan modern, ternyata menyimpan berbagai kekuatan yang luar biasa, bahkan dengan peran yang dimainkannya tidak jarang lembaga pesantren dalam berbagai kesempatan menjadi motor penggerak (*agent of change*) terjadinya perubahan social.²

Berdirinya sebuah pesantren berpangkal pada sosok seorang kyai yang menjadi pemimpin pondok pesantren. Biasanya sang kyai membangun pondok pesantren dengan kekayaan sendiri, sehingga sarana fisik di pesantren beserta segala isinya, tak lain kecuali miliknya sendiri. Ketika pesantren tumbuh dan berkembang dengan semakin bertambah jumlah santri, menuntut sarana dan prasarana yang memadai. Kyai sebagai pengasuh akan mengusahakan perluasan tanah yang diperuntukkan bagi bangunan-bangunan yang diperlukannya. Pengadaan tanah dilakukan dengan membeli atau juga melalui penyerahan tanah *waqaf*, dengan tetap memposisikan kyai sebagai pemegang hak milik. Dalam perjalanannya, pesantren telah mengalami berbagai perkembangan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dalam catatan Direktorat Pondok Pesantren 2007/2008 Setditjen Pendidikan Islam Departemen Agama sebagaimana dikutip Zamaksyari Dhofier bahwa perkembangan berbagai jenis pendidikan modern di lingkungan pesantren mengalami peningkatan drastis antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 telah berkembang pondok pesantren dari 7.536 menjadi 21. 521. Selama 10 tahun jumlah pesantren baru mencapai 4.015. Dalam 10 tahun ke depan diperkirakan jumlah pesantren akan mencapai sekitar 30.000.³

¹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyai dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 57

²Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, Psantren Yogyakarta: Nawesea Press, 2009) 88

³ Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, Psantren Yogyakarta: Nawesea Press, 2009) 4

Pesatnya perkembangan yang dialami suatu pondok pesantren, selain ditentukan oleh dukungan material, juga ditentukan oleh kemampuan kyai membangun kerjasama dengan berbagai pihak serta kepercayaan masyarakat sekitarnya terhadap kyai sebagai pimpinan suatu pesantren. Kuatnya kerjasama serta tingginya kepercayaan masyarakat sekitarnya terhadap pesantren dapat menjadi modal sosial bagi pesantren di dalam mengembangkan dirinya.

Berkaitan dengan modal sosial, Putnam dalam bukunya *"Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy"*, mendefinisikan modal sosial sebagai *"features of sosial organization, such as networks, norma, and trust, that facilitate co-ordination and co-operation for mutual benefit"*, ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama. Lebih jauh, Putnam mengungkapkan bahwa modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan suatu lembaga.⁴

Modal Sosial dalam pengembangan Lembaga Pendidikan .

a. Perkembangan Konsep Modal Sosial

Modal sosial merupakan konsep sosiologis yang sering dipergunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan di hampir semua negara, termasuk di Indonesia. Konsep modal sosial menunjukkan bukan kepada arti yang biasa seperti kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan asset atau modal nyata yang penting dalam hidup masyarakat. Hanifah seorang pendidik Amerika memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya sebagaimana tertera dalam bukunya *"The Rural School Community Centre"* (1916). Menurut Hanifah, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling empati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Konsep modal sosial telah dipergunakan oleh Hanifah hampir seabad yang lalu, istilah tersebut baru dimulai dikenal dunia akademis sejak akhir tahun 1980-an. Pierre Bourdieu seorang sosiolog Perancis kenamaan, dalam bukunya *"The Forms of Capital"* (1986) mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial.

⁴ Putnam *"Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy"*, (Journal America, 1993) 8

Menurut Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaannya yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Coleman dalam sebuah tulisannya *"Social capital in the Creation of Human Capital"*. (1988) memperkenalkan modal sosial sebagai sarana kapitual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif ekonomi. Dengan cara demikian ia menggunakan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis proses sosial.

Coleman mengidentifikasi tiga unsur utama yang merupakan pilar modal sosial. *Pertama*, kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan social *kedua* modal sosial menurut Coleman adalah pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat. *ketiga* adalah norma-norma yang harus ditaati dengan sangsi yang jelas dan efektif. Pentingnya kepercayaan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi merupakan sorotan utama kajian yang dilakukan Francis Fukuyama. Dalam karyanya *"Trust the Sosial Virtues and the Creation of Prosperity"* (1995), Fukuyama mengatakan bahwa kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. Berkaitan dengan modal sosial, Fukuyama (1999: 16) mengungkapkan:

"Social capital can be defined simply as a set of informal values or norms shared among members of group that permits cooperation among them. If a members of the grouf came to expect that others will behave reliably and honestly. Trust is like a lubrican that makes the running of any grouf or organization more efficient".

Dalam mempergunakan konsep modal sosial, ia berpendapat modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling bantu membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama menganggap kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku. Karena itu, ia berkesimpulan bahwa tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian di Cina, Jepang dan beberapa negara Asia, Fukuyama menemukan bahwa untuk mencapai keberhasilan ekonomi diperlukan adanya organisasi-organisasi ekonomi berskala besar dan korporasi yang demokratis. Namun, menurut pendapatnya, kelembagaan itu baru dapat berfungsi secara baik apabila terdapat cukup perhatian terhadap pentingan peranan kebiasaan-kebiasaan dalam budaya tradisional. Peraturan, kontrak dan rasionalitas ekonomi semata tidak cukup menjamin stabilitas dan kesejahteraan

masyarakat secara merata. Diperlukan adanya nilai-nilai resiprositas, tanggung jawab moral, kewajiban terhadap masyarakat dan kepercayaan yang lebih didasarkan pada adat kebiasaan daripada terhadap budaya.

Bertitik tolak pada keyakinan bahwa nilai-nilai budaya berkaitan dengan kepercayaan pada suatu bangsa merupakan faktor penentu perkembangan ekonomi negara bersangkutan, akhirnya, Fukuyama sampai kepada perbedaan bangsa-bangsa dalam dua kategori. Kategori pertama adalah bangsa-bangsa yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah (*low trust society*) dalam nilai budayanya. Masyarakat seperti itu sulit untuk mengembangkan usaha-usaha yang berskala besar karena dalam nilai budayanya tingkat kepercayaan terbatas pada lingkungan keluarga atau familistik. Di luar keluarga itu kepercayaan sulit untuk ditumbuhkan. Sebaliknya Negara-negara yang memiliki tingkat kepercayaan yang besar akan mampu meningkatkan keberhasilan dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi.

b. Peran Modal Sosial dalam Perubahan Sosial.

Dalam perubahan sosial, modal sosial memiliki peranan penting dan strategis. Dalam berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh sejumlah pakar terhadap berbagai kelompok masyarakat di beberapa Negara menemukan bahwa modal sosial berperan penting dalam mencapai keberhasilan, termasuk keberhasilan meningkatkan ekonomi mereka (Gittel, et al, 2001). Studi ini memperlihatkan bagaimana modal sosial berperan dalam menjalin kerjasama antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan untuk membantu perkembangan usaha masyarakat. Pendekatan modal sosial ini merupakan alternatif dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat golongan lemah yang lazimnya ditunjang dana yang berasal dari bantuan proyek yang dikelola oleh pemerintah.

Keberhasilan ini dimungkinkan karena prinsip dasar modal sosial yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan kepercayaan baik antara sesama warga masyarakat maupun dengan pihak pemberi bantuan, telah dapat menggantikan jaminan berupa angunan yang merupakan peraturan standar dalam pemberian kredit bank pada umumnya. Dengan demikian modal sosial merupakan "angunan" yang dapat di andalkan. Angunan alternatif ini bisa diterima pihak bank karena dalam masyarakat sendiri telah terdapat kesepakatan untuk memikul tanggung jawab bersama dan saling mengontrol antara sesama warga. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang warga di dalam penggunaan dan pengambilan kredit tidak hanya dianggap sebagai masalah pribadi tetapi merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu masyarakat dapat

menjatuhkan sanksi sosial terhadap warga yang menyebabkan hilangnya kepercayaan itu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Coleman (1988) bahwa pilar utama modal sosial berupa struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu.

Modal sosial juga dapat dipergunakan di dalam mengembangkan lembaga-lembaga sosial seperti lembaga politik, lembaga pendidikan—termasuk di dalamnya organisasi sosial pendidikan pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan pesantren di Lombok. Kuatnya modal sosial yang dimiliki pondok pesantren dapat dilihat pada beberapa hal, yaitu, norma dasar yang dijadikan acuan bagi pondok pesantren, adanya hubungan dan jaringan kerjasama yang dibangun pesantren, baik secara internal sesama santri pesantren maupun secara eksternal melakukan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, serta adanya rasa kebersamaan warga pesantren.

c. Pengembangan Pondok Pesantren.

Mengelola konsep apapun tentang pesantren, menurut Abdurrahman Wahid⁵ bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena harus diingat adanya kenyataan bahwa tidak ada konsep yang mutlak rasional dapat diterapkan di pesantren. Baik karena sejarah pertumbuhannya yang unik maupun karena tertinggalnya dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain di dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis, pesantren belum lagi mampu mengelolah dan kemudian melaksanakan konsep yang disusun berdasarkan pertimbangan akal belaka, bagaimanapun sistematis konsep itu, setidaknya-tidaknya untuk generasi ini, semua konsep yang bersifat demikian akan menghadapi hambatan-hambatan yang luar biasa dalam pelaksanaannya. Untuk itu lanjut Abdurrahman Wahid, haruslah di jauhi pendapat yang mewajibkan pesantren untuk mengikuti pola pemikiran tertentu, kecuali dalam hal yang sangat terbatas, menurut Abdurrahman Wahid⁶ strategi dasar sekaligus dapat digunakan sebagai landasan suatu *blue-print* pembangunan pesantren oleh pemerintah, dalam kerjasama dengan pihak-pihak lain, yaitu: (1) usaha meyakinkan pesantren, bahwa keadaan rawan yang ada hanyalah merupakan sebagian saja dari keadaan umum yang melanda kehidupan bangsa kita dewasa ini. Keadaan ini dapat mereka atasi dengan melaksanakan proyek-proyek perbaikan yang bersifat selektif dan bertahap. (2) jika keyakinan itu dapat ditumbuhkan dikalangan pesantren,

⁵Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2001) 37.

⁶ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan...*, 2001, 55.

sudah tentu dengan cara persuasif, maka mereka dapat diajak untuk memilih penggarapan proyek yang paling mendesak pemecahannya di tempat masing-masing. (3) Berdasarkan pilihan proyek yang akan di garap itu, maka barulah dicari cara-cara terbaik untuk mempersiapkan penggarapannya. (4) jika telah ada bukti terlaksananya ketiga pokok di atas dengan baik, barulah kepada pesantren ditawarkan konsep-konsep yang lebih lengkap dan kompleks, meliputi bermacam-macam konsep.

Pesantren disuplai oleh berbagai kalangan, baik ulama, ilmuwan, maupun cendekiawan. Visi pesantren masa depan sangat ditentukan oleh uluran tangan mereka. Keterlibatan mereka adalah indikasi bahwa pesantren mampu menjadi institusi pendidikan yang modern.

Untuk dapat mengembangkan dan memperbaharui sistem yang ada dalam pesantren, Nurcholish Madjid⁷ menganggap perlu segera dipikirkan adalah : *Pertama*, tidak ada yang dapat memimpin proses perubahan pesantren kecuali “orang dalam”. Sebab untuk dapat diterimanya gagasan-gagasan baru itu, betapapun sulitnya pada permulaan, diperlukan kepemimpinan yang “*legitimate*” atau sah menurut ukuran-ukuran pesantren sendiri. Meskipun oleh yang “*legitimate*” itu, tetap diperlukan sikap hati-hati yang ekstra. Perubahan yang dilakukan tidak mungkin “radikal revolusioner”, tetapi diusahakan seperti pepatah : “ bagaimana benang tak putus tepung tak terserak”.

Kesahan atau “*legitimate*” pimpinan dan kaitannya dengan kharisma. Tetapi tidak cukup hanya dengan kharisma saja, tetapi juga diperlukan skill atau keahlian. Dan jika ini tidak dimiliki oleh seorang pemimpin pesantren maka dapat dipenuhi oleh seorang pemimpin pesantren maka dapat dipenuhi oleh orang lain yang kedudukannya hanya sebagai pembantu atau sebagai pemimpin teknis.

Kedua, biaya senantiasa merupakan persoalan yang kronis. Ini tentu harus dicari jalan pemecahannya. Untuk pertimbangan efisiensi, dan karena keterbatasan dana dan lain-lain, maka perlu disusun skala prioritas yang bisa dituangkan dalam rencana kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin sekali prioritas utama adalah perombakan kurikulum, sebab selain biayanya relatif kecil pengaruh dan implikasinya pun cukup besar dan luas. *Ketiga*, upaya pengembangan dan pembinaan pondok pesantren dapat dikatakan sebagai upaya transformasi pondok pesantren agar tetap survive dan semakin berkembang kearah yang lebih baik. Upaya transformasi ini dilakukan dengan landasan kaidah yang menunjukkan bahwa

⁷ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik...*, 1997, 101-102.

pondok pesantren memang terus berupaya meningkatkan eksistensinya dengan melakukan berbagai pengembangan dan perubahan kearah yang lebih baik.

Keempat, pendekatan yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan pendidikan luar sekolah, termasuk pondok pesantren, menurut sudjana⁸ dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini menekankan bahwa dalam upaya mengembangkan program itu dilakukan oleh pimpinan dengan mengikutsertakan semua pihak yang terlibat dalam program dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan program.

Partisipasi merupakan proses yang dengan proses tersebut suatu kelompok atau lebih, yang terlibat dalam penyelenggaraan program, berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan pengembangan program. Kegiatan pengembangan itu dilakukan karena adanya rangsangan dari pihak pengambil keputusan atau karena kehendak kelompok yang bersangkutan yang didasarkan atas tuntutan kebutuhan baru atau perubahan lingkungan. Dalam proses ini, maka setiap pihak yang terlibat dalam program secara terkoordinasi melakukan kegiatan bersama secara efektif dan efisien dalam mengembangkan program yang telah atau sedang dilaksanakan.

Dalam proses pengembangan komponen tersebut, tentunya akan berdampak pula pada pengembangan kepribadian para santri secara individual. Sehingga jika pendidikan tersebut diselenggarakan secara komprehensif, maka akan terbentuk pribadi yang utuh dan integral, “*insan kamil*”. Adapun pengembangan individual tersebut adalah pengembangan keagamaan, semangat ukhuwah Islamiyah, intelektual, estetika (keindahan), etika (moral) kepedulian masyarakat, perkembangan jasmani, rohani dan keterampilan.

Upaya pembinaan dapat diartikan sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu pondok pesantren agar dapat memenuhi misi dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, keagamaan dan pengembangan masyarakat. Upaya pembinaan terhadap pondok pesantren oleh Departemen Agama, dilakukan terhadap dua aspek utama, yaitu: aspek non-fisik dan aspek fisik. Yang termasuk dalam aspek non-fisik yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren berupa pendidikan agama, pendidikan dakwah, pendidikan formal, pendidikan seni, kepramukaan, olahraga dan kesehatan, keterampilan, dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan aspek fisik adalah sarana dan prasarana atau fasilitas kegiatan pondok pesantren berupa masjid, perumahan kyai dan guru, asrama/pondok, perkantoran dan perpustakaan, ruang belajar, aula

⁸Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: fah production, 2000), 355.

dan balai diklat, peralatan penunjang kegiatan pendidikan, balai kesehatan, lapangan olah raga, koperasi dan lingkungan masyarakat.

Dalam peranannya sebagai lembaga pengembangan masyarakat, pondok pesantren melalui potensi yang dimilikinya dapat memposisikan dirinya sebagai sentra pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat atau umat sekitarnya. Karenanya, tidaklah berlebihan jika pemerintah berupaya memberdayakan pondok pesantren sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pondok Pesantren dan Perubahan Sosial ketokohan Tuan Guru

Kata pesantren berasal dari kata "santri", dengan awalan 'pe' dan akhiran 'an' yang berarti tempat berkumpulnya para santri⁹. Berkaitan dengan kata santri, setidaknya ada dua pendapat yang bisa dijadikan acuan, *pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa "santri" itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. *Kedua* pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, persisnya dari kata Cantrik, yang artinya seseorang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru pergi menetap.¹⁰ Pesantren adalah lembaga tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.¹¹

Sementara Louis Ma'lûf, mendefinisikan kata pondok sebagai "*kebôn*" yaitu "setiap tempat singgah besar yang disediakan untuk menginap para turis dan orang-orang yang berekreasi."¹² Pondok" juga bermakna "rumah sementara waktu seperti yang didirikan di ladang, di hutan dan sebagainya." Muzayin Arifin mendefinisikan pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan agama yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama, di mana para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seorang atau beberapa kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.¹³

Dalam penyebutan sehari-hari, istilah pesantren biasanya dikaitkan dengan kata pondok. Penyebutan pesantren akan lebih *sreg* dengan menyandingkan istilah pondok pesantren. Kata pondok diturunkan dari kata bahasa Arab "*fundûqun*" (ruang tidur, wisma, hotel sederhana).¹⁴

⁹ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 21.

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Bilik...*, 1997, 22.

¹¹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994) 87.

¹² Louis Ma'luf, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dar al-Mishria, 1986) 507

¹³ Muzayin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Umum dan Agama* (Semarang: Toha Putra) 104.

¹⁴ Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren* (Jakarta: Cemara Indah, 1978) 139.

Kafrawi memberikan garis pembeda antara istilah pesantren dan pondok pesantren dari segi ada-tidaknya "pondok" di lingkungan pesantren. Menurutny, pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tetapi para santrinya tidak disediakan pondok di kompleks pesantren, namun tinggal tersebar di seluruh penjuru desa sekeliling pesantren tersebut (santri kalong), dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem *weton*, yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu seperti tiap hari Jumat, Minggu, Selasa dan sebagainya.

Sedangkan pondok pesantren merupakan lembaga gabungan antara sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem *bandongan*, *sorogan* ataupun *wetonan*, dan para santri disediakan pondokan di mana kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok/asrama dalam pesantren tersebut.¹⁵

Pendidikan pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia, hingga saat ini model pendidikan pesantren masih bertahan di tengah-tengah modernisasi pendidikan di luar pesantren itu sendiri. Tetapi, juga harus diakui bahwa pesantren-pesantren yang dulu pernah mengalami kejayaan, sebagian mengalami kesurutan sejarah karena regenerasi para kiainya tidak disiapkan dalam pengkaderan serius. Sementara arus sedemikian kuat terhadap pesantren, justru dunia pesantren tertantang untuk menjawab problematika pendidikan di masyarakat.

Dengan demikian, pesantren sesungguhnya terbangun dari konstruksi kemasyarakatan dan epistemologi sosial yang menciptakan suatu transendensi atas perjalanan historis sosial. Sebagai *center of knowledge*, dalam pendakian sosial, pesantren mengalami metamorfosis yang berakar pada konstruksi epistemologi dari variasi pemahaman di kalangan umat Islam. Hal yang menjadi titik penting ialah kenyataan eksistensi pesantren sebagai salah satu pemicu terwujudnya kohesi sosial.

Pada dasarnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dikelola secara konvensional dan dilaksanakan dengan sistem asrama (pondok) dengan kyai sebagai sentra utama serta masjid sebagai pusat lembaganya.¹⁶ Sejak awal pertumbuhannya, pesantren mempunyai bentuk yang beragam sehingga tidak ada suatu standarisasi yang berlaku bagi semua pesantren. Namun demikian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pesantren tampak adanya pola umum, yang diambil dari makna peristilahan pesantren itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu pola tertentu.

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Pandangan Hidup Para Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1988, 9.

¹⁶ Syarif, *administrasi Pesantren*, (Jakarta: Paryu Barkah, 1983), 5.

Pada sebuah lembaga pendidikan, kurikulum merupakan salah satu komponen utama yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolok-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan. Menurut Iskandar W., kurikulum merupakan program pendidikan sekolah yang disediakan untuk siswa.

Kurikulum pesantren dalam hal ini pesantren “*salaf*” yang statusnya sebagai lembaga pendidikan non-formal, hanya mempelajari agama, bersumber pada kitab-kitab klasik meliputi bidang-bidang studi: *Tauhid, Tafsir, Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Tashawuf, Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Balagh, dan Tajwid), Mantiq, dan Akhlak*, yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: 1) kitab dasar, 2) kitab menengah, 3) kitab besar.

Kurikulum dalam jenis pendidikan pesantren berdasarkan tingkat kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab, jadi ada tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Setiap kitab bidang studi memiliki tingkat kemudahan dan kompleksitas pembahasan masing-masing, sehubungan dengan itu, maka evaluasi kemajuan belajar pada pesantren juga berbeda dengan evaluasi dari madrasah dan sekolah umum.

Jenis madrasah dan sekolah umum bersifat formal, dan kurikulumnya mengikuti ketentuan pemerintah. Madrasah mengikuti ketentuan dari Departemen Agama, dengan menggunakan perbandingan 30% berisi mata pelajaran agama, dan 70% berisi mata pelajaran umum. Berbeda dengan pesantren, dengan bobot perbandingan 20% berisi matapelajaran umum, dan 80% berisi matapelajaran agama. Tetapi, pada umumnya masing-masing pesantren menyesuaikan kurikulum-kurikulum yang datang dari Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional tersebut menurut kepentingan dan keyakinan masing-masing. Akhirnya jenis pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah umum adalah untuk memenuhi ketentuan pembangunan, kemajuan ilmu, dan teknologi, atau dengan kata lain untuk memenuhi tantangan zamannya. Kedua jenis pendidikan ini ternyata menjadi *jembatan* bagi pesantren yang menghubungkannya dengan sistem pendidikan nasional, dan sebaliknya kedua jenis pendidikan formal tersebut juga mendapat penyempurnaan dari jenis pendidikan non-formal, yaitu “*pesantren*” terutama mengenai moral yang tidak dapat didikan secara formal di madrasah dan sekolah umum. Dengan kata lain, makna pesantren sebagai jenis *pendidikan non-formal*, berbeda dengan makna *pendidikan non-formal dalam term pendidikan umum*, di mana makna pendidikan non-formal dalam terma yang terakhir berarti memberikan *komplemen* dan *suplemen* pada ketrampilan atau kemampuan yang telah dimiliki oleh anak didik agar mampu melayani kebutuhan yang semakin meningkat sehubungan dengan kompleksitas tantangan

pekerjaan yang dihadapinya. Makna pendidikan non-formal pada pesantren berarti mendasari, menjiwai, dan melengkapi akan nilai-nilai pendidikan formal

a. Unsur-unsur Pesantren

Berkaitan dengan unsur-unsur pesantren, Zamaksyari Dhofier¹⁷ dalam bukunya Tradisi Pesantren: Pandangan Hidup Kyai, menjelaskan sebagai berikut:

1. Pondok.

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan tradisional di mana para siswa atau santri tinggal bersama dan belajar di bawah naungan bimbingan seseorang (lebih) guru yang dikenal sebagai tuan guru. Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam lingkungan kelompok pesantren di mana tuan guru bertempat tinggal dan juga menyediakan tempat untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Kompleks pesantren ini biasanya dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Masjid

Masjid merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap paling tepat untuk mendidik santri, terutama dalam praktek sholat, khotbah, sholat Jum'at dan pengajian kitab-kitab klasik. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dan tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dan sistem pendidikan Islam tradisional.

3. Santri

Asal usul perkataan santri setidaknya ada dua pendapat yang bisa dijadikan acuan, pertama, santri berasal dari kata "sastri", sebuah kata dari sanskerta yang berarti melek huruf. Kedua, santri berasal dari bahasa Jawa "cantrik", yaitu seseorang yang mengikuti seseorang guru ke mana ia pergi atau menetap. Tentunya dengan tujuan dapat belajar ilmu pengetahuan darinya mengenai suatu keahlian.¹⁸

Dalam tradisi pesantren, santri dapat dikategorikan dua kelompok: a) *santri mukim*, yaitu murid-murid yang berasal dari jauh dan menetap dalam kompleks pesantren, b) *santri kalong*, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Mereka dalam mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik atau pulang pergi (Jawa: *nglaju*) dari rumah sendiri.

4. Pengajian Kitab-kitab Islam Klasik

¹⁷Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES 1983)

¹⁸Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm 19-20

Pada masa lalu, pengajian kitab-kitab Islam klasik terutama karangan-karangan ulama yang menganut paham safi'iyah merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Keseluruhan kitab-kitab klasik Islam yang diajarkan di pesantren digolongkan menjadi 8 kelompok: a) nahwu (syntak) dan saraf (morfologi); b) fiqih; c) ushul fiqih; d) hadits; e) tafsir; tauhid; g) tasawuf dan etika; h) cabang-cabang lain seperti tarikh/sejarah, dan balaghoh (gaya bahasa).

Tujuan utama pengajaran ini adalah untuk mendidik calon-calon ulama. Mereka mengembangkan keahliannya dalam bahasa Arab melalui sistem *sorogan* (privat) dalam pengajian sebelum mereka pergi ke pesantren dengan sistem *bandongan* (kuliah umum).

5. Kyai

Kyai atau tuan guru merupakan unsur yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia merupakan figur dan panutan masyarakat dan bahkan pendiri pesantren. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan atau maju mundurnya suatu pesantren semata-mata bergantung kepada kemampuan pribadi semata.

Pada umumnya pondok pesantren sangat tergantung pada figur seorang kyai sebagai pimpinan. Sebagaimana diungkapkan oleh Dhofier, bahwa perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda: 1) sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat “Kiai Garuda Kencana”, sebutan kereta emas yang ada di Keraton Yogyakarta, 2) gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya, dan 3) gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang mempunyai pesantren dan mengajar kitab kuning.¹⁹

b. Pengembangan Pondok Pesantren.

Mengelola konsep apapun tentang pesantren, menurut Abdurahman Wahid²⁰ bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena harus diingat adanya kenyataan bahwa tidak ada konsep yang mutlak rasional dapat diterapkan di pesantren. Baik karena sejarah pertumbuhannya yang unik maupun karena tertinggalnya dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain di dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis, pesantren belum lagi mampu mengelola dan kemudian melaksanakan konsep yang disusun berdasarkan pertimbangan akal belaka, bagaimanapun sistematis konsep itu, sedikit-tidaknya untuk generasi ini, semua konsep yang bersifat demikian akan menghadapi hambatan-hambatan yang luar biasa dalam pelaksanaannya. Untuk itu lanjut

¹⁹ Zamakhsyari Dhifir, *Tradisi Pesantren ...*, 1994, 55

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2001) 37.

Abdurrahman Wahid, haruslah dijaui pendapat yang mewajibkan pesantren untuk mengikuti pola pemikiran tertentu, kecuali dalam hal yang sangat terbatas, menurut Abdurrahman Wahid²¹ strategi dasar sekaligus dapat digunakan sebagai landasan suatu *blue-print* pembangunan pesantren oleh pemerintah, dalam kerjasama dengan pihak-pihak lain, yaitu: (1) usaha meyakinkan pesantren, bahwa keadaan rawan yang ada hanyalah merupakan sebagian saja dari keadaan umum yang melanda kehidupan bangsa kita dewasa ini. Keadaan ini dapat mereka atasi dengan melaksanakan proyek-proyek perbaikan yang bersifat selektif dan bertahap. (2) jika keyakinan itu dapat ditumbuhkan dikalangan pesantren, sudah tentu dengan cara persuasif, maka mereka dapat diajak untuk memilih penggarapan proyek yang paling mendesak pemecahannya di tempat masing-masing. (3) Berdasarkan pilihan proyek yang akan di garap itu, maka barulah dicari cara-cara terbaik untuk mempersiapkan penggarapannya. (4) jika telah ada bukti terlaksananya ketiga pokok di atas dengan baik, barulah kepada pesantren ditawarkan konsep-konsep yang lebih lengkap dan kompleks, meliputi bermacam-macam konsep.

Kesahan atau "*legitimate*" pimpinan dan kaitannya dengan kharisma. Tetapi tidak cukup hanya dengan kharisma saja, tetapi juga diperlukan skill atau keahlian. Dan jika ini tidak dimiliki oleh seorang pemimpin pesantren maka dapat dipenuhi oleh seorang pemimpin pesantren maka dapat dipenuhi oleh orang lain yang kedudukannya hanya sebagai pembantu atau sebagai pemimpin teknis.

Kedua, biaya senantiasa merupakan persoalan yang kronis. Ini tentu harus dicarikan jalan pemecahannya. Untuk pertimbangan efisiensi, dan karena keterbatasan dana dan lain-lain, maka perlu disusun skala prioritas yang bisa dituangkan dalam rencana kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin sekali prioritas utama adalah perombakan kurikulum, sebab selain biayanya relatif kecil pengaruh dan implikasinya pun cukup besar dan luas. *Ketiga*, upaya pengembangan dan pembinaan pondok pesantren dapat dikatakan sebagai upaya transformasi pondok pesantren agar tetap survive dan semakin berkembang kearah yang lebih baik. Upaya transformasi ini dilakukan dengan landasan kaidah yang menunjukkan bahwa pondok pesantren memang terus berupaya meningkatkan eksistensinya dengan melakukan berbagai pengembangan dan perubahan kearah yang lebih baik.

²¹ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan....*, 2001, 55.

Keempat, pendekatan yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan pendidikan luar sekolah, termasuk pondok pesantren, menurut Sudjana²² dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini menekankan bahwa dalam upaya mengembangkan program itu dilakukan oleh pimpinan dengan mengikutsertakan semua pihak yang terlibat dalam program dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan program.

Partisipasi merupakan proses yang dengan proses tersebut suatu kelompok atau lebih, yang terlibat dalam penyelenggaraan program, berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan pengembangan program. Kegiatan pengembangan itu dilakukan karena adanya rangsangan dari pihak pengambil keputusan atau karena kehendak kelompok yang bersangkutan yang didasarkan atas tuntutan kebutuhan baru atau perubahan lingkungan. Dalam proses ini, maka setiap pihak yang terlibat dalam program secara terkoordinasi melakukan kegiatan bersama secara efektif dan efisien dalam mengembangkan program yang telah atau sedang dilaksanakan.

Sudjana,²³ menambahkan, dalam pengembangan lembaga pendidikan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen strategis mengandung implikasi bahwa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan dilakukan secara strategis.

Dalam proses pengembangan komponen tersebut, tentunya akan berdampak pula pada pengembangan kepribadian para santri secara individual. Sehingga jika pendidikan tersebut diselenggarakan secara komprehensif, maka akan terbentuk pribadi yang utuh dan integral, “*insan kamil*”. Adapun pengembangan individual tersebut adalah pengembangan keagamaan, semangat ukhuwah Islamiyah, intelektual, estetika (keindahan), etika (moral) kepedulian masyarakat, perkembangan jasmani, rohani dan keterampilan.

Upaya pembinaan dapat diartikan sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu pondok pesantren agar dapat memenuhi misi dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, keagamaan dan pengembangan masyarakat. Upaya pembinaan terhadap pondok pesantren oleh Departemen Agama, dilakukan terhadap dua aspek utama, yaitu: aspek non-fisik dan aspek fisik. Yang termasuk dalam aspek non-fisik yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren berupa pendidikan agama, pendidikan dakwah, pendidikan formal, pendidikan seni, kepramukaan, olahraga dan kesehatan, keterampilan, dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan aspek fisik adalah

²²Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah production, 2000), 355.

²³ Sudjana, *Manajemen...*, 2000, 357.

sarana dan prasarana atau fasilitas kegiatan pondok pesantren berupa masjid, perumahan kyai dan guru, asrama/pondok, perkantoran dan perpustakaan, ruang belajar, aula dan balai diklat, peralatan penunjang kegiatan pendidikan, balai kesehatan, lapangan olah raga, koperasi dan lingkungan masyarakat.

Dalam peranannya sebagai lembaga pengembangan masyarakat, pondok pesantren melalui potensi yang dimilikinya dapat memposisikan dirinya sebagai sentra pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat atau umat sekitarnya. Karenanya, tidaklah berlebihan jika pemerintah berupaya memberdayakan pondok pesantren sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan.

Modal Sosial dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan.

a. Perkembangan Konsep Modal Sosial

Modal sosial merupakan konsep sosiologis yang sering dipergunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan di hampir semua negara, termasuk di Indonesia. Konsep modal sosial menunjukkan bukan kepada arti yang biasa seperti kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan asset atau modal nyata yang penting dalam hidup masyarakat. Hanifah seorang pendidik Amerika memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya sebagaimana tertera dalam bukunya *"The Rural School Community Centre"* (1916). Menurut Hanifah, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling empati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Coleman berpendapat bahwa pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya. Sekalipun sebenarnya terdapat banyak fungsi modal sosial tetapi ia mengatakan bahwa pada dasarnya semuanya memiliki dua unsur yang sama, yakni: (1). Modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial, dan (2). Modal sosial memberikan kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut. Ia memberi penekanan terhadap dua aspek dari struktur sosial yang sangat penting dalam memudahkan terciptanya dan berkembangnya modal sosial yang menciptakan pengukungan dalam sebuah jaringan sosial yang menciptakan pengukungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu. Kedua, adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam tulisannya yang berjudul "*Foundation of Sosial Theory*" (1990) Coleman mengatakan antara lain bahwa modal sosial, seperti halnya modal ekonomi, juga bersifat produktif. Tanpa adanya modal sosial seseorang tidak akan bisa memperoleh keuntungan material dan mencapai keberhasilan lain secara optimal. Sebagai modal-modal yang lainnya, seperti modal fisik dan modal manusia, modal sosial tidak selalu memberi manfaat dalam situasi tertentu. Semua bentuk modal sosial bisa bermanfaat untuk memudahkan seseorang melakukan tindakan dalam suatu situasi, tetapi dalam situasi lain tidak ada gunanya dan bahkan bisa menimbulkan kerugian.

Pentingnya kepercayaan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi merupakan sorotan utama kajian yang dilakukan Francis Fukuyama. Dalam karyanya "*Trust the Sosial Virtues and the Creation of Prosperity*" (1995), Fukuyama mengatakan bahwa kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. Berkaitan dengan modal sosial, Fukuyama (1999: 16) mengungkapkan:

"Social capital can be defined simply as a set of informal values or norms shared among members of group that permits cooperation among them. If a members of the grouf came to expect that others will behave reliably and honestly. Trust is like a lubrican that makes the running of any grouf or organization more efficient".

Dalam mempergunakan konsep modal sosial, ia berpendapat modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling bantu membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama menganggap kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku. Karena itu, ia berkesimpulan bahwa tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian di Cina, Jepang dan beberapa negara Asia, Fukuyama menemukan bahwa untuk mencapai keberhasilan ekonomi diperlukan adanya organisasi-organisasi ekonomi berskala besar dan korporasi yang demokratis. Namun, menurut pendapatnya, kelembagaan itu baru dapat berfungsi secara baik apabila terdapat cukup perhatian terhadap pentingnya peranan kebiasaan-kebiasaan dalam budaya tradisional. Peraturan, kontrak dan rasionalitas ekonomi semata tidak cukup menjamin stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Diperlukan adanya nilai-nilai resiprositas, tanggung jawab moral, kewajiban terhadap masyarakat dan kepercayaan yang lebih didasarkan pada adat kebiasaan daripada terhadap budaya.

Bertitik tolak pada keyakinan bahwa nilai-nilai budaya berkaitan dengan kepercayaan pada suatu bangsa merupakan faktor penentu perkembangan ekonomi negara

bersangkutan, akhirnya, Fukuyama sampai kepada perbedaan bangsa-bangsa dalam dua kategori. Kategori pertama adalah bangsa-bangsa yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah (*low trust society*) dalam nilai budayanya. Masyarakat seperti itu sulit untuk mengembangkan usaha-usaha yang berskala besar karena dalam nilai budayanya tingkat kepercayaan terbatas pada lingkungan keluarga atau familistik. Di luar keluarga itu kepercayaan sulit untuk ditumbuhkan. Sebaliknya Negara-negara yang memiliki tingkat kepercayaan yang besar akan mampu meningkatkan keberhasilan dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi.

b. Peran Modal Sosial dalam Perubahan Sosial.

Dalam perubahan sosial, modal sosial memiliki peranan penting dan strategis. Dalam berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh sejumlah pakar terhadap berbagai kelompok masyarakat di beberapa Negara menemukan bahwa modal sosial berperan penting dalam mencapai keberhasilan, termasuk keberhasilan meningkatkan ekonomi mereka (Gittel, et al, 2001). Studi ini memperlihatkan bagaimana modal sosial berperan dalam menjalin kerjasama antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan untuk membantu perkembangan usaha masyarakat. Pendekatan modal sosial ini merupakan alternatif dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat golongan lemah yang lazimnya ditunjang dana yang berasal dari bantuan proyek yang dikelola oleh pemerintah.

Kesimpulan

Modal sosial juga dapat dipergunakan di dalam mengembangkan lembaga-lembaga sosial seperti lembaga politik, lembaga pendidikan—termasuk di dalamnya organisasi sosial pendidikan pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan pesantren di Lombok. Kuatnya modal sosial yang dimiliki pondok pesantren dapat dilihat pada beberapa hal, yaitu, norma dasar yang dijadikan acuan bagi pondok pesantren, adanya hubungan dan jaringan kerjasama yang dibangun pesantren, baik secara internal sesama santri pesantren maupun secara eksternal melakukan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, serta adanya rasa kebersamaan warga pesantren.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2001).
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyai dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983) .
- Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren* (Jakarta: Cemara Indah, 1978)
- Karel A. Steenkbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: mizan, 1991).
- M. Dawam RAhardjo, (ed), *pesantren dan pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fajar Dunia, 1999).
- Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1986).
- Marno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Bandung:Refika Aditama, 2008).
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994).
- Mujamil Qomar, *Pesantren; dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2009).
- Muzayin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Umum dan Agama* (Semarang: Toha Putra) .
- Putnam "Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy", (Journal America, 1993)
- Sarijo, Marwan, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Dharma Bakti, 1985).
- Soedjoko Prasodjo et. el, *Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian pesantren al-Falah dan Delapan Pesantren Lain di Bogor*, (LP3ES: Jakarta, 1982).
- Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: falah production, 2000).
- Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: falah production, 2000).
- Syarif, *administrasi Pesantren*, (Jakarta: Paryu Barkah, 1983).
- Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES 1983).
- Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, Psantren Yogyakarta: Nawesea Press, 2009).